

Tinjauan Prosedur Penggajian Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang

Euneng Hassannah, Kholida Atiyatul Maula²

^{1,2} Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pelaksanaan riset mempunyai tujuan supaya mengetahui prosedur sistem penggajian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Guna mengetahui tercapainya prosedur penggajian secara tepat, maka di lakukanlah penelitian dalam bentuk wawancara dan dokumentasi. Suatu kelembagaan instansi pemerintahan pasti memiliki aktivitas berbagai faktor penting yang memberi pengaruh pencapaian tujuan dengan hal itu perlu adanya para karyawan pemerintahan yang sudah mempunyai motivasi kerja dalam perjanjian kerja dengan periode tertentu, tapi terkait hal ini sangatlah memberi pengaruh kepada imbalan balas jasa yang dibayar tiap bulan. Maka dari itu, ada berbagai peraturan pada penyusunan mekanisme penggajian karyawan.

Prosedur ini diimplementasikan agar menaikkan efisiensi dalam membayar upah atau gaji yang sesuai dan mencegah kekeliruan maupun hal menyimpan yang bisa terjadi. Prosedur penggajian ialah rangkaian dari tahapan yang dilakukan untuk menuntaskan aktivitas pemberian gaji, sehingga terwujud nya tujuan prosedur yang efisien dan efektif. Dengan demikian, prosedur penggajian yang tepat akan mengurangi atau menghindari adanya kecurangan dalam pemberian gaji kepada pegawai.

Kata kunci : *Penggajian, Prosedur Penggajian*

Copyright (c) 2022 Euneng Hassannah

✉ Corresponding author :

Email Address ehassannah@gmail.com , kholida.maula@fe.unsika.ac.id

PENDAHULUAN

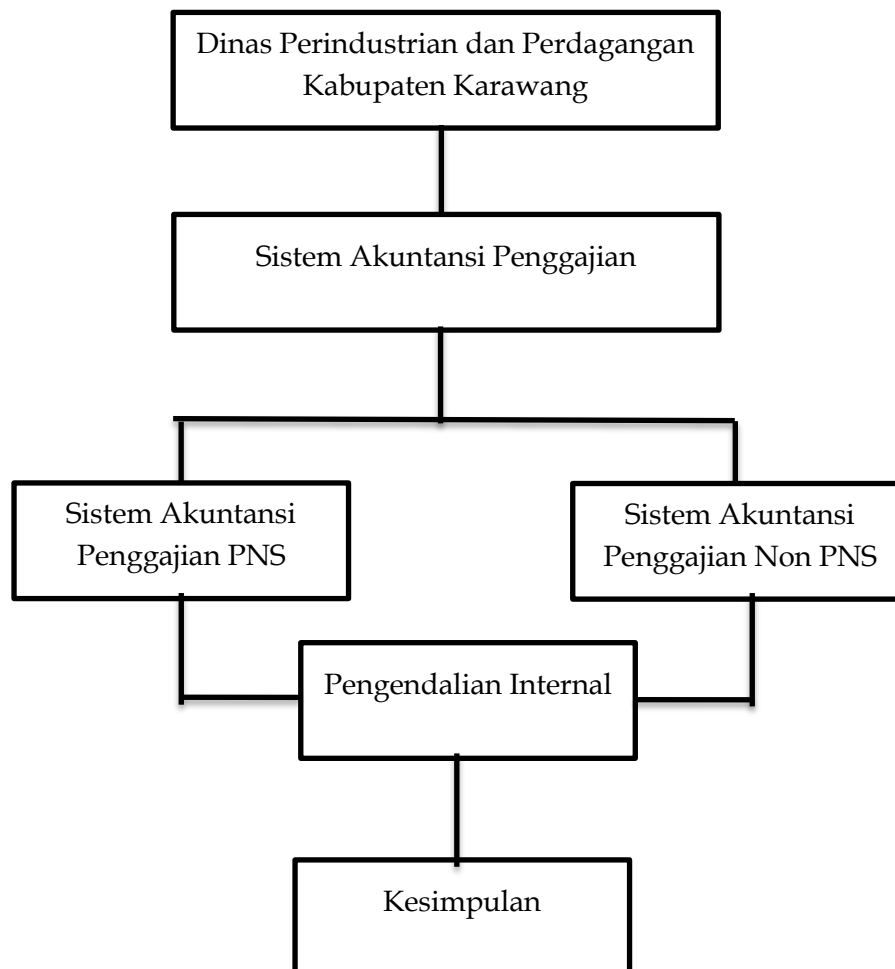
Setiap instansi pemerintah mempunyai sistem penggajian yang sudah teratur. Secara spesifik diperlukan suatu teknik atau sistem untuk mengatur proses penggajian tersebut, sehingga pembayarannya dapat dilakukan dengan tepat. Di sisi lain, teknik untuk membayar pekerja di pemerintahan berbeda dari perseroan komersil. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksamaan orientasi antara instansi pemerintah dengan perseroan komersil. Oleh karenanya, instansi pemerintah lebih fokus terkait pemberian jasa atau pelayanan masyarakat, sedangkan perseroan berpusat demi memperoleh keuntungan.

Gaji yaitu suatu imbalan jasa yang diberi oleh tiap industri maupun instansi atas layanan yang sudah diciptakan oleh karyawan. Gaji sebagai sesuatu yang begitu krusial dikarenakan berkaitan terhadap seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan, dimulai dari tingkatan pimpinan paling tinggi, menengah, hingga tingkatan pekerja golongan paling rendah.

Dalam sebuah instansi proses kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil memiliki pengaruhnya besar kepada pelaksanaan tugas pemerintahan serta pembangunan bangsa. Mengacu terhadap UU RI No. 5 Th. 2014, Pegawai Negeri Sipil yang bisa disingkat jadi PNS yaitu WNI yang mempunyai suatu persyaratan, dilakukan pengangkatan selaku pegawai ASN dengan tetap dari Pembina kepegawaian agar berposisi jabatan di pemerintahan. Maka dari itu, PNS mempunyai hak memperoleh upah, fasilitas, tunjangan, jaminan hari tua, jaminan pensiun,

pengembangan kompetensi, perlindungan selaras terhadap aturan yang diberlakukan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai karyawan yang terpenuhi persyaratan dan dilakukan pengangkatan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan dan disertai tugas pada jabatan negeri serta di gaji didasarkan atas aturan UU. Sementara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) ataupun honorer yaitu pegawai tidak tetap yang dibayar oleh APBN atau APBD. Terkhusus dalam sistem penggajian, pengendalian intern yang kokoh diperlukan untuk mengatur, memantau, serta mengevaluasi seluruh unit aktivitas di suatu instansi. Pengendalian internal yang baik guna meraih tujuan melaksanakan perbaikan operasional yang tidak efisien serta efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dari prosedur penggajian, cara perhitungan gaji dan pengendalian internal pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dalam penelitian ini penulis menganalisis sistem akuntansi penggajian dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dengan menggunakan metode data kuantitatif untuk menganalisis. Dalam penggajian ini terdapat dua jenis penggajian yang akan di bahas oleh penulis yaitu, penggajian PNS dan Non-PNS. Setelah itu, penulis menganalisis pengendalian internal terhadap sistem akuntansi penggajian yang berada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karawang.

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang diselenggarakan yaitu kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif berarti jenis riset yang dipakai supaya melaksanakan analisis data melalui cara pendeskripsian ataupun

penggambaran data yang sudah terhimpun sesuai apa adanya. Ada pula makna lainnya atas deskriptif kuantitatif berarti metode yang tujuannya guna menciptakan gambar ataupun deskriptif mengenai kondisi dengan objektif yang mempergunakan angka, dimulai dari menghimpun data, menafsirkan kepada data itu dan menampilkan serta hasilnya yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi yang terkait dengan Sistem Informasi Akuntansi Penggajian

Di bawah ini yaitu berbagai fungsi yang berhubungan terhadap proses penggajian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Karawang :

a. Fungsi Kepegawaian

Fungsi ini diduduki oleh Kasubbag Umum. Fungsi ini mempunyai kewenangan guna melakukan pencatatan karyawan baru, melakukan pendataan upah karyawan yang sudah pensiun, menempatkan karyawan, serta kenaikan pangkat karyawan.

b. Fungsi Pencatat Waktu

Fungsi ini bertugas guna melaksanakan pencatatan waktu hadir untuk seluruh karyawan yang mempergunakan fingerprint dan manual. Fungsi dan tugas mencatat waktu ini dilaksanakan yaitu bagian kasubbag umum.

c. Fungsi Pembuat Daftar Gaji

Fungsi ini mempunyai tugas guna menciptakan daftar gaji yang berisikan penghasilan serta beban tiap karyawan dalam rentang waktu pembayaran upah atau gaji. Aktivitas ini dilaksanakan oleh divisi keuangan.

d. Fungsi Akuntansi

Pada sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi tugasnya agar melaksanakan pengecekan ulang daftar gaji yang sudah dibuatnya oleh divisi keuangan. Tugas ini dilakukan oleh bagian bendahara keuangan.

e. Fungsi Keuangan

Fungsi ini bertugas guna menciptakan daftar gaji dan memproses gaji pada Bank Jawa Barat (BJB) untuk melaksanakan transfer gaji dengan perbankan dan pembuatan slip gaji sehingga nanti akan dibagi terhadap pegawai.

2. Dokumen Yang Digunakan Dalam Proses Penggajian

Berbagai dokumen yang dipakai pada proses penggajian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang yakni mencakup :

a. Surat Pengangkatan pegawai atau kenaikan pangkat

Dokumen ini diterbitkan dari fungsi kasubbag umum mencakup surat keputusan yang berkaitan terhadap karyawan bila terdapat kenaikan pangkat pegawai.

b. Daftar Hadir

Dokumen ini dipakai guna mencatatkan waktu hadir pegawai. Dokumen ini dibuat oleh kasubbag umum lalu diberikan terhadap divisi keuangan/kasir agar sebagai landasan dalam menghitung gaji.

c. Daftar Gaji

Dokumen ini berisikan total gaji pokok dan tunjangan pada setiap pegawai negeri sipil lalu dikurangi potongan-potongan sedangkan pada pegawai non PNS berisi gaji pokok, jumlah waktu kerja dan jumlah gaji yang diterima.

d. Rekap Daftar Gaji

ini sebagai ringkasan gaji PNS pergolongan diciptakan didasarkan atas daftar gaji yang dilakukan oleh bagian keuangan.

e. Bukti Kas Keluar

Dokumen ini sebagai perintah pengeluaran uang yang diciptakan bendahara keuangan mengacu pada informasi pada daftar gaji yang diperoleh dari pembuat daftar gajinya.

f. Slip Gaji Pegawai

Dokumen ini merupakan catatan ataupun perincian mengenai hal yang jadi isi catatan gaji yang dibuat oleh bagian keuangan.

3. Catatan Akuntansi Yang Digunakan Dalam Sistem Akuntansi Penggajian

Pencatatan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang tidak sama dengan pencatatan akuntansi yang dilaksanakan industri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sekadar melaksanakan pencatatan kepada daftar gaji, berbagai potongan, maupun tunjangan.

Sistem Penggajian PNS dan Non PNS

Sistem penggajian untuk PNS non PNS melalui proses yang sama yaitu diawali dengan kelengkapan dokumen seperti daftar gaji, daftar hadir pegawai, dan dokumen penunjang perubahan upah terkait kenaikan pangkat, pengangkatan pegawai baru ataupun perubahan besaran gaji. Selanjutnya menginput daftar gaji keseluruhan ke SIPD untuk menentukan anggaran. Setelah itu, dilakukan membuat surat penyediaan dana (SPD), surat perintah pencairan dana (SP2D), surat keputusan (SK), surat perintah membayar (SPM), surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibawakan menuju Bank Jawa Barat (BJB) lalu dana yang cairnya masuk pada rekening para pegawai setelah itu melakukan tanda tangan bukti penerimaan gaji. Saat ini penggajian sudah tidak lagi menggunakan uang tunai dan amplop karena dengan proses transfer ini membuat proses penggajian lebih efisien. Kini Pembayaran gaji PNS dan Non PNS sudah tidak lagi memakai kwitansi ataupun amplop karena saat ini pembayaran upah sudah melewati transfer langsung ke rekening setiap karyawan maka gaji atau upah yang diperoleh tiap bulan tidak mencakup dana tunai hal ini membuat proses penggajian menjadi lebih cepat dan tepat.

DAFTAR ABSENSI TENAGA HARIAN LEPAS (THL)																																
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KARAWANG																																
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR																																
BULAN APRIL 2022																																
NO	NAMA	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Dini Rakhmawati, S.DS	g			f	g	g	g				g	g	g	g					g	g	g	g					g	g	g		
2	Aris Alpan	u			u	u	u	u	u			u	u	u	u					u	u	u	u	u				u	u	u	u	
3	Himawan Pugliwa Sutanto	z			z	z	z	z	z			z	z	z	z					z	z	z	z	z				z	z	z	z	
4	Koro Suci Imtiyaz, S.Pd	f			f	f	f	f	f			f	f	f	f					f	f	f	f	f				f	f	f	f	
5	Devi Rosmalasari	h			h	h	h	h	h			h	h	h	h					h	h	h	h	h				h	h	h	h	
6	Destiana Yuniar, SKM	t			t	t	t	t	t			t	t	t	t					t	t	t	t	t				t	t	t	t	
7	Ade Irma Fatmawati, S.Kom	f			f	f	f	f	f			f	f	f	f					f	f	f	f	f				f	f	f	f	
8	Riki Zakkyuddin, S.Pd	g			g	g	g	g	g			g	g	g	g					g	g	g	g	g				g	g	g	g	
9	Rahmat Mulyana, SE	o			o	o	o	o	o			o	o	o	o					o	o	o	o	o				o	o	o	o	

Gambar 1 Tabel Absensi Non PNS

Perhitungan gaji PNS dan Non PNS

Cara perhitungan gaji Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah gaji pokok penghasilan ditambahkan tunjangan - tunjangan lalu dikurangi potongan yang telah ditetapkan. Dalam menghitung gaji karyawan dilaksanakan oleh divisi keuangan dan besaran gaji yang di terima pegawai sesuai dengan golongan, tunjangan dan potongan yang telah di tetapkan.

Perhitungan gaji pegawai negeri sipil memiliki landaan perhitungan gaji selaras terhadap aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti gaji pokok yang telah sesuai dengan PP nomor 15 tahun 2019. Dalam perhitungan Waktu jam kerja, laporan waktu jam kerja pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang menggunakan sidik jari atau finger print sebagai media absen elektronik bagi para pegawai PNS dan Non PNS.

GAJI INDUK		
RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CATATAN PEMBUAT DAFTAR GAJI BERSANGKUTAN		
PENGHASILAN :		
01. GAJI POKOK	Rp.	214,575,680
02. TUNJANGAN ISTRI	Rp.	18,639,380
03. TUNJANGAN ANAK	Rp.	5,278,196
04. TUNJANGAN PERB PENGHASILAN	Rp.	0
05. TUNJANGAN STRUKTURAL	Rp.	17,365,000
06. TUNJANGAN FUNGSIONAL	Rp.	6,960,000
07. TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	Rp.	5,095,000
08. SUBSIDI ASURANSI KESEHATAN	Rp.	0
09. TUNJANGAN BERAS	Rp.	13,687,380
10. TUNJANGAN KEMAHALAN DAERAH	Rp.	0
11. TUNJANGAN DAERAH TERPENCIL	Rp.	0
12. TUNJANGAN Pph PASAL 21	Rp.	254,743
13. TUNJANGAN JKK	Rp.	0
14. TUNJANGAN JKM	Rp.	0
15. PEMBULATAN	Rp.	3,259
JUMLAH KOTOR	Rp.	281,858,638
POTONGAN :		
01. IURAN WAJIB (IWP 1%)	Rp.	2,679,133
02. IURAN WAJIB (IWP 8%)	Rp.	19,079,462
03. Pph PASAL 21	Rp.	254,743
04. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	0
05. POTONGAN BULOG	Rp.	0
06. POTONGAN ASKES	Rp.	0
07. POTONGAN LAIN2	Rp.	1,000,000
08. POTONGAN SEWA RUMAH	Rp.	0
09. POTONGAN JKK	Rp.	0
10. POTONGAN JKM	Rp.	0
JUMLAH POTONGAN	Rp.	23,013,338
JUMLAH BERSIH	Rp.	258,845,300
Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah		
Ruangan ini disediakan untuk Catatan dari tempat pembayaran SPM		

Gambar 2 Perhitungan gaji PNS keseluruhan

Adapun perhitungan perhitungan gaji Non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang adalah sesuai dengan tingkat jabatan, gaji pokok dan waktu jam kerja pegawai. Gaji pegawai Non PNS ini tidak ada tunjangan seperti penggajian pada PNS dan dokumen yang perlukan hanya menggunakan absensi finger print yang ada di kantor dan absensi manual pada kertas yang telah disediakan. Absensi manual ini akan menjadi dokumen untuk perhitungan dalam jumlah penggajian yang akan di dapat.

Tabel 1 perhitungan gaji Non PNS

Jabatan	Waktu kerja	Honor	Pph21	total
---------	-------------	-------	-------	-------

Pengelola program dan kegiatan	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Pengadministrasian umum	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Pengolah data	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Pengadministrasian pengujian	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Penyusun rencana pengawasan	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Pengadministrasian program dan Kerjasama	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Penata laporan keuangan	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Pengelola data	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Analisis pengembangan pasar	19 hari	Rp. 140.000		Rp. 2.660.000
Pengelola data pemeran dan kemitraan	19 hari	Rp. 130.000		Rp. 2.470.000
Pengadministrasian keuangan	19 hari	Rp. 120.000		Rp. 2.280.000
Pengadministrasian penerimaan	19 hari	Rp. 120.000		Rp. 2.280.000
Pengadministrasian kepegawaian	19 hari	Rp. 120.000		Rp. 2.280.000
Pengadministrasian pasar dan perlindungan akses pasar	19 hari	Rp. 120.000		Rp. 2.280.000
Juru pungut retribusi	19 hari	Rp.120.000		Rp. 2.280.000
Analisis pengembangan pasar	19 hari	Rp. 110.000		Rp. 2.090.000
keamanan	1 bulan	Rp. 2.400.000		Rp. 2.400.000
Kebersihan	20 hari	Rp. 80.000		Rp. 1.600.000

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel di atas pegawai Non PNS atau Honorer tidak dikenakan pph 21 karena berdasarkan PMK No. 102/PMK 010/2016 mengenai Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.

SIMPULAN

Mengamati hasil riset beserta pembahasan yang sudah dilaksanakan sebelumnya, terkait mekanisme penggajian PNS dan Non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang, sehingga ditentukan kesimpulannya yakni :

1. Sistem penggajian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sudah dilakukan secara tepat dan sederhana. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuan penggajian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang juga sudah tepat seperti, Surat Perintah Membayar (SPM), yang merupakan bahan guna penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
2. Cara perhitungan pembentukan gaji PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sudah tepat yaitu, mencakup berbagai tunjangan, gaji pokok, iuran, beserta potongan lainnya. Sedangkan gaji Non PNS hanya terdiri dari gaji pokok saja lalu di hitungan dengan jumlah waktu jam kerja.
3. Pengendalian internal yang berada dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang sudah sesuai dengan tujuannya. Meluputi aspek organisasi, prosedur pencatatan, sistem otorisasi, serta praktik yang sehat. Seperti para pegawai yang melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Referensi :

- A Hall, James. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Anggraini, Elsa Refiana. (2021). *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai UPT Balai Latihan Kerja Surabaya*. Thesis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Diakses dari <http://eprints.perbanas.ac.id/8258/>
- Ardi, Naswa, Aprilia. (2020). *Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Riau*. Thesis, Universitas Islam Riau. Diakses dari <https://repository.uir.ac.id/11037/>
- Bodnar, George H., Hopwood, William S. (2014). *Accounting Information Systems*. Eleventh Edition. Pearson Education.
- Carl S. Warren, dkk. (2014). *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta : Salemba Empat.
- Delfy Yandri, Ayu Rosianie. (2021). *Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengendalian Internal Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan (Remittance)*, 2(2), 86-92.
- Harrison Jr., Walter T., et al. (2012). *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Horngren, Charles T., Srikant M.Datar, Madhav V.Rajan. (2012). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. 14th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Mardi. (2011). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mas'ula, Sayyidati. (2021). *Analisis Sistem dan Prosedur Penggajian Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro*. Thesis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Diakses dari <http://eprints.perbanas.ac.id/8411/>
- Maulida. (2018). *Sistem Akuntansi Penggajian Pada Politeknik Negeri Banjarmasin*. Thesis, Politeknik Negeri Banjarmasin. Diakses dari <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/dlJZe6V0EofuQn8qPIgrwzU19tpKBWCaGILxR7OTXc2mDYk4sH.pdf>
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nisa Dera Prisna. (2022). *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Balance)*, 1(1), 12-17.
- Pebriyanti, Tiwi. (2019). *Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor*. Thesis, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Diakses dari <http://repository.ibik.ac.id/991/>
- Prianthara, Teddy. (2013). *Akuntansi untuk manajer*. Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Puspawarni, Lintang. (2019). *Sistem dan Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor*. Thesis, Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Diakses dari <http://repository.ibik.ac.id/970/>
- Romney, Marshall B., Steinbart, Paul Jhon. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadeli, Muhammad. (2014). *Aplikasi Bisnis dengan PHP dan MySQL*. Palembang: Maxikom.
- Samsi, Muhammad. (2021). *Prosedur Penggajian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur*. Thesis, Universitas Muhammadiyah Metro. Diakses dari <https://eprints.ummetro.ac.id/997/>
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Akuntansi dasar dan aplikasi dalam bisnis versi IFRS, Jilid 1, Edisi kedua*. Penerbit Indeks.
- Sutabri, Tata. (2005). *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulhendra, Bunga Riska Amalia. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Pada Wilayah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 2(1), 34-41.